

Judul : DPR: Pak Mendag, please bela para pengusaha lokal
Tanggal : Minggu, 29 Agustus 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Persoalkan Kelakuan Smelter Tiongkok

DPR: Pak Mendag, Please Bela Para Pengusaha Lokal

Politisi Senayan menyangkan masih terjadinya perlakuan tidak adil yang diterima pengusaha lokal dengan pemilik pabrik pemurnian (*smelter*) asal Tiongkok. Usai persoalan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel, para pengusaha nikel kembali menemui persoalan baru terkait kinerja surveyor.

ANGGOTA Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan, dia mendapat laporan dari pengusaha nikel, ternyata mereka masih dizalimi dengan berbagai cara. Lantaran terjadi perbedaan jauh dari hasil uji kadar logam nikel antara yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Pemerintah dengan yang ditunjuk pembeli.

"Penurunannya bisa jauh, dari 1,8 persen bisa menjadi 1,5 persen bahkan 1,3 persen. Akibatnya, pengusaha mengalami kerugian," kata politisi Gerindra ini di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

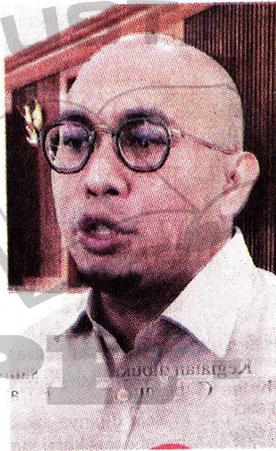
Menurut Andre, Pemerintah sudah menentukan Harga Patokan Mineral (HPM) yang digunakan sebagai acuan dasar royalti. Pemerintah juga telah menunjuk lima surveyor, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia,

Carsurin, Geo Service, dan Anindya. Surveyor ini menentukan HPM, besaran royalti, dan PPh tersebut, dan juga uji kadar logam nikel.

Andre menduga, perbedaan hasil uji kadar logam nikel ini karena surveyor yang ditunjuk antara pengusaha lokal dengan pabrik smelter Tiongkok berbeda. Smelter Tiongkok menunjuk surveyor Anindya, sementara pengusaha lokal menggunakan Sucofindo atau Surveyor Indonesia.

"Kalau pakai Sucofindo atau Surveyor Indonesia angkanya 1,87 persen. Begitu sampai ke *smelter* Tiongkok jatuh jadi 1,5 persen. Jauh turunnya," terang Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini.

Andre mengaku sudah menanyakan langsung ke pihak Sucofindo dan Surveyor Indo-



Andre Rosiade

nesia terkait selisih ini. Menurut kedua surveyor yang ditunjuk Pemerintah ini, mustahil jika hasil uji kadar nikel sangat jauh. Sementara pengambilan sampelnya jelas.

"Kalaupun turun, paling tidak jauh. Misal awalnya 1,87 persen, turun jadi 1,85 persen. Lha, ini jadi 1,5 persen. Akhirnya pengusaha kita dikasih pilihan pakai harga dengan kadar 1,5 persen. Akibatnya pengusaha



Speaker Quote

"Saya minta Pak Menteri Perdagangan, bela pengusaha kita. Kita bela NKRI. Ini penting karena ini menyangkut sumber daya alam kita, menyangkut keberlangsungan pengusaha nasional kita."

■ Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade

kita merugi," imbuhnya.

Selain surveyor yang ditunjuk Pemerintah, pengujian seharusnya juga menyertakan surveyor yang merupakan perwakilan pengusaha nikel agar hasil yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga hasilnya nanti tidak lagi diperdebatkan. Karena itu Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) kudu segera menyelesaikan sengkaret ini.

"Saya minta Pak Menteri Perdagangan, bela pengusaha kita. Kita bela NKRI. Ini penting karena ini menyangkut sumber daya alam kita, menyangkut keberlangsungan

pengusaha nasional kita," tegas Andre.

Sementara itu Menteri Perdagangan M Luthfi memerintahkan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana untuk segera memanggil seluruh surveyor tersebut. Dia menegaskan, tidak akan segan mencabut izin surveyor yang merugikan negara.

"Minggu depan akan kita panggil semua pemainnya. Pokoknya kalau ada yang merugikan, izinnya saya cabut. Akhir minggu depan selesai ya Pak Dirjen," tegas Luthfi. ■ KAL